

POLITISASI AGAMA DI TAHUN POLITIK: POLITIK PASCA-KEBENARAN DI INDONESIA DAN ANCAMAN BAGI DEMOKRASI

Budi Kurniawan

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

budikurniawan@uns.ac.id

Abstract

This paper analyzes the politicization of religion that occurred in Indonesia, especially in the current political year. Ahead of the 2018 electoral election and the 2019 presidential election, religious sentiments are often used for pragmatic political interests. An example is reflected on 2019 Ganti Presiden Movement. In the context of post-truth politics, feelings and opinions influence the discourse of public politics more than objective facts. In other words, the line between facts and opinions is blurred. Hoax, opinions, and distortions of fact dominate the existing political discourses. This paper uses a sociological approach to analyzing post-truth political phenomena in Indonesia as reflected in recent cases of politicization of religion. The paper also provides a brief overview of some popular data and facts in actual political discourse as evidence of disinformation. However, the politicization of religion reflects unhealthy democratic conditions. Issues of religion in Indonesian context is sensitive and prone to be the trigger of conflict. This paper asserts that the politicization of religion in the post-truth era must be addressed critically and seriously, so that the climate of democracy in Indonesia can be well preserved.

Keyword: Politicization of religion, 2019 ganti presiden, Post-truth, Democracy

A. PENDAHULUAN

Iklim politik Indonesia tahun-tahun terakhir diwarnai dengan kasus politisasi agama yang mencederai nalar demokrasi. Politisasi agama mencapai titik kulminasinya pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Sejak Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta, Sentimen agama mulai dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politiknya. Kasus penodaan agama yang menjerat Ahok menjadi kapital politik bagi lawan politiknya dalam memainkan sentimen agama di dalam kompetisi elektoral nantinya.

Mobilisasi massa dalam Aksi 411 dan 212 di Jakarta menjadi bukti nyata menguatnya solidaritas muslim di Jakarta khususnya bahkan di berbagai daerah di Indonesia dalam merespons isu penodaan agama yang dilakukan Ahok. Di sisi lain, mobilisasi massa tersebut bernuansa politisasi agama (Kresna 2017). Dari tuntunan penegakan hukum terhadap Ahok, melebar menjadi ladang politik praktis untuk menyampaikan ajakan yang mereka pahami tentang haramnya kepemimpinan non-muslim dalam islam yang wacananya digulirkan dalam aksi tersebut. Dengan menggunakan eksemplar Aksi 212 yang diadakan mendekati hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta, dapat mengindikasikan adanya mobilisasi massa dalam rangka kepentingan politik tertentu (Institute for Policy Analysis of Conflict 2018). Kasus penodaan agama yang menjerat Ahok dijadikan magnet kepentingan politik sebagai legitimasi terhadap politisasi agama yang dilakukan oleh lawan politiknya pada saat itu.

Belajar dari kontestasi politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diwarnai dengan politisasi agama, tahun 2018-2019 sangat berpotensi bagi pihak-pihak tertentu untuk menyulut isu etnisitas dan agama. Instrumentalisasi agama maupun tokoh agama dalam perpolitikan mulai terjadi pada tahun politik ini. Salah satu gejala politisasi agama yang menjadi perhatian publik saat ini adalah Gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan ini merupakan salah satu manifestasi sikap kritis terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, yaitu pemerintahan Joko Widodo yang dinilai “kurang memuaskan”. Yang menarik dari fenomena tersebut adalah dalam inisiasi dan prosesnya sarat dengan politisasi agama. Iklim demokrasi Indonesia diuji dengan politisasi agama pada era Pasca-kebenaran.

Tahun 2018-2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Terminologi tahun politik mulai lazim digunakan setelah populer di media massa. Disebut dengan tahun politik karena pada rentang waktu dua tahun tersebut terdapat pesta demokrasi yang besar bagi Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa jabatan 2019-2024.

Makalah ini membahas politisasi agama yang aktual terjadi Indonesia pada tahun politik dalam perspektif sosiologi. Makalah ini menjabarkan fenomena politisasi agama yang aktual di Indonesia sebagai salah satu gejala politik pasca-kebenaran. Dimana politik pasca-kebenaran dipenuhi dengan opini dan disinformasi yang mendominasi dan dipercaya daripada fakta, politisasi agama yang aktual di Indonesia tidak lepas dari basis opini dan fakta yang parsial demi sebuah legitimasi terhadap tindakannya.

B. REALITAS PASCA-KEBENARAN DAN POLITIK

Definisi *post-truth* dijabarkan dalam kamus Oxford untuk menggambarkan sebuah kondisi bahwa emosi dan kepercayaan pribadi lebih memengaruhi opini publik daripada fakta objektif. Kata tersebut mendapat predikat *Word of The Year* pada tahun 2016 dari *Oxford Dictionaries* (McIntyre 2018). Popularitas kata tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2016, walaupun sudah ada sejak dua dekade terakhir.

Post-truth atau dalam bahasa Indonesia dialihbahasakan dengan istilah pasca-kebenaran, menandai sebuah era yang dipenuhi dengan repudiasi atau pengingkaran fakta dan akal sehat. Berita-berita palsu, hoaks, dan bahkan teori konspirasi mudah sekali viral dan dipercaya publik. Publik bahkan meragukan berita yang sudah jelas terverifikasi dari media yang kredibel. Dengan kemudahan akses teknologi informasi pada saat ini, A. C. Grayling menekankan pada realitas pasca-kebenaran yang mudah tersebar di internet terutama melalui media sosial (Legg 2018) (Coughlan 2017). Media sosial menjadi ladang dimana pasca-kebenaran dapat diamati secara langsung. Fenomena pasca-kebenaran singkat kata dipenuhi dengan *pembenaran* (bukan kebenaran secara substantif) atau legitimasi yang kemudian diargumentasikan melalui opini dan hoaks, disinformasi, maupun fakta yang parsial.

Secara historis, fenomena dan genealogi *post-truth* memiliki

rekam jejak yang panjang. Peningkaran dan keraguan terhadap kredibilitas ilmu pengetahuan menjadi salah satu faktor penting munculnya fenomena ini. Selain itu, beberapa faktor yang juga memengaruhi perkembangan *post-truth* adalah bias kognitif, merosotnya kualitas media tradisional, populernya media sosial dan permasalahan berita palsu yang mudah menyebar, serta iklim postmodernisme (McIntyre 2018). Di sisi lain, Parsialitas fakta menjadi salah satu ciri khusus dalam era *post-truth*.

“The selective use of facts that prop up one’s position, and the complete rejection of facts that do not, seems part and parcel of creating the new post-truth reality.” (McIntyre 2018)

Era *post-truth* dipenuhi dengan fakta yang parsial yang memiliki daya legitimatif terhadap suatu kepentingan. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah adanya proses seleksi dalam menyampaikan fakta, dimana fakta yang mendukung untuk kepentingan tertentu maka fakta tersebutlah yang disebut “fakta”. Jika tidak sesuai dengan kepentingan tertentu, fakta tersebut bukanlah “fakta” dan ditolak. Realitas seperti inilah yang menjadi kunci utama dalam memahami fenomena *post-truth*.

Istilah *post-truth* menjadi populer saat terjadi kontestasi politik di Amerika Serikat, dimana pada saat tersebut terjadi elektoral presiden yang diikuti oleh Donald Trump dan Hillary Clinton (Sabato, Kondik dan Skelley 2017). Trump dapat dijadikan eksemplar utama dalam mengidentifikasi fenomena pasca-kebenaran. Trump mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial, dimana ia melabeli berita yang diproduksi oleh media-media yang terverifikasi di amerika serikat sebagai *fake news* atau berita palsu. Repudiasi dan sikap skeptis Trump terhadap media yang mainstream di amerika tersebut menjadi salah satu gejala pasca-kebenaran. Trump menduga media-media *mainstream* tidak *fair* dan ingin menjatuhkan kredibilitasnya dalam pilpres di AS, sehingga Trump dengan segala legitimasinya bersikap antipati terhadap pers di amerika (Kellner 2018).

Fenomena pasca-kebenaran tidak hanya terjadi di amerika, namun melanda di berbagai kawasan dunia, seperti dalam kasus Nigel Farage (Inggris), Marie Le Pen (Prancis), Frauke Petry (Jerman), dan Geert Wilders (Belanda) (Lintang 2016). Meningkatnya akses dan kecanggihan teknologi dalam mengakses

dan mereproduksi berita, menyebabkan realitas pasca-kebenaran menjadi hal yang cair dan tidak bisa dihindari oleh siapapun yang aktif dengan internet. Tak terkecuali di Indonesia, realitas pasca-kebenaran terlihat dalam media sosial yang dipenuhi dengan opini subyektif dan legitimatif, rendahnya kepercayaan terhadap media massa populer, dan menggantungkan kepercayaan kepada teori konspirasi dan hoaks. Hal tersebut menjadikan sebuah urgensi untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait realitas pasca-kebenaran di era millennial saat ini.

Tak terhindarkan, realitas pasca-kebenaran menunjukkan eksistensinya dalam dunia politik di Indonesia. Fenomena politisasi agama menjadi sebuah fenomena yang dikaji dalam makalah ini sebagai sebuah bentuk politik pasca-kebenaran di Indonesia. Banyak sekali contoh kasus hoaks maupun berita palsu yang beredar di media sosial terkait isu politik. Namun dalam hal yang berkaitan dengan politisasi agama, konteks yang dibicarakan adalah bukan berita palsu yang sering beredar, tetapi legitimasi atau pembenaran terhadap instrumentalisasi agama dalam politik yang akan dikaji lebih jauh.

C. POLITISASI AGAMA PADA TAHUN POLITIK

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Politisasi berarti membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis. Dari pengertian ini dapat ditarik sebuah arti, dimana politisasi diartikan sebagai sebuah perbuatan baik berupa gagasan, ide, dan lain sebagainya menjadi bersifat politik. Jika politisasi dikaitkan dengan agama, maka, pengertian politisasi agama menjadi: suatu perbuatan baik perbuatan itu berupa gagasan, ide, pemahaman dan lain sebagainya yang berkenaan tentang keagamaan menjadi bersifat politik, bukan bersifat keagamaan lagi (Malik dan Batubara 2014).

Dengan kata lain, dalam Politisasi agama terdapat instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik tertentu. Politisasi agama juga menjadi salah satu konsep penting dalam memahami Teologi Politik seperti Islam Politik, dimana memandang agama memiliki daya fungsional strategis terhadap realitas politik yang ada.

Tahun politik Indonesia yang terjadi pada tahun 2018-2019 diprediksi dan diwaspadai oleh berbagai pihak terkait penggunaan

sentimen etnisitas dan agama dalam kompetisi politik. Indonesia seharusnya banyak belajar dari kasus politisasi dan kapitalisasi agama yang terjadi pada saat elektoral gubernur DKI Jakarta tahun sebelumnya. Walaupun proses elektoral berlangsung di ibukota, tetapi sentimennya meluas sampai ke daerah lainnya (Kresna 2017). Aksi 411 dan 212 serta beragam variannya yang berhasil memobilisasi muslim dari berbagai daerah ke Jakarta menjadi pelajaran penting akan kondisi demokrasi dan toleransi terhadap eksistensi keberagaman etnisitas dan agama dalam politik. Berbagai isu yang menyertainya, seperti isu kriminalisasi ulama, sentimen kebencian terhadap etnis tertentu dan agama tertentu memperlihatkan sebuah urgensi untuk kembali menelaah kedewasaan demokrasi Indonesia dalam menghadapi keragaman.

Pasca gejolak kontestasi pilkada tersebut, alumni 212 mengadakan acara reuni 212. Reuni 212 merupakan sebuah langkah kapitalisasi agama dalam perjalanan panjang politisasi agama pada tahun politik. Momentum mobilisasi massa yang sukses pada aksi 212 dimanfaatkan dengan melakukan reuni. Hal ini tidak terlepas dengan agenda politik tahun berikutnya dimana akan dilaksanakannya pilkada serentak 2018 dan elektoral presiden 2019. (Friana 2017)

Gejala politisasi agama mulai muncul pada awal tahun politik. Sebuah gerakan yang awalnya dari media sosial, kemudian terwujud ke dalam aktivisme di dunia nyata. Bahkan presiden secara langsung menanggapi perihal aktivisme yang mempunyai distingsi “kaos” ini. Gerakan #2019GantiPresiden menjadi pembahasan utama dalam makalah ini.

Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden

Pencetus gerakan #2019GantiPresiden adalah Mardani Ali Sera, Eggi Sudjana, dan Neno Warisman. Gerakan ini sangat cair bahkan tidak memiliki kontrol yang bersifat organisatoris. Gerakan ini selain menunjukkan eksistensinya di dunia maya dengan tagar #2019GantiPresiden, gerakan ini juga mulai mengibarkan sayapnya di dunia nyata (Kresna 2018). Salah satu penggagas gerakan ini, Neno Warisman, mengklaim gerakan ini bukanlah gerakan politik (Wiwoho 2018). Otoritas pengawas pemilu terkait yaitu badan pengawas pemilu tidak menganggap gerakan ini sebagai sebuah gerakan kampanye politik bahkan kampanye hitam. Akseptabilitas gerakan #2019GantiPresiden ini digunakan untuk melancarkan

manuver politiknya yaitu melakukan agitasi dan propaganda terkait kinerja presiden saat ini. Kepentingan politis tidak dapat dinafikkan dalam gerakan ini.

Gerakan #2019GantiPresiden tak lepas dari penggunaan ruang masjid yang digunakan untuk menanamkan sentimen agama dalam melancarkan tujuannya (JPNN 2018). Gerakan #2019GantiPresiden dideklarasikan pertama kali di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2018. Walaupun gerakan ini memiliki tujuan untuk tidak memilih Jokowi pada periode yang kedua kalinya jika mencalonkan diri sebagai presiden, secara formal gerakan ini belum mendeklarasikan calon presiden tertentu (Wiwoho 2018). Dinamika politik masih berkembang dan calon presiden yang akan diusungpun masih dalam penggodokan.

Bai'at kepada Rizieq Shihab

Bai'at atau sumpah setia kepada Rizieq Shihab dilakukan oleh ratusan jemaah Sholat Subuh pada hari Jum'at, Tanggal 13 April 2018. Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Bai'at ini dipimpin oleh Muhammad al Khatthath selaku Sekjen Forum Umat Islam (FUI) dan Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212. Peserta bai'at terdiri dari beberapa komponen, yaitu Forum Umat Islam, Dewan Kemakmuran Masjid Baiturrahim, Suara Islam, PA 212, Remaja Masjid Baiturrahim, Gubernur Muslim Jakarta dan Gerakan Indonesia Salat Subuh (GISS). Dalam acara tersebut disisipkan juga propaganda #2019GantiPresiden (Faiz 2018).

Kegiatan tersebut menjadi sebuah bukti bahwa politisasi masjid terjadi di Indonesia. Masjid yang notabene tempat ibadah dijadikan ruang untuk melakukan sumpah atau bai'at kepada Rizieq Shihab yang telah berperan dalam memainkan sentimen agama di pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya, Rizieq Shihab berhasil memobilisasi massa 411 dan 212 untuk menggalang dukungan politik dari akar rumput terkait apa yang ia sebut sebagai penegakan hukum terhadap penista agama. Tidak bisa dipungkiri, aksi tersebut dilaksanakan dalam waktu dekat dengan pilkada DKI, hal tersebut membuat kepentingan dibalik aksi tersebut semakin terlihat.

Takjil Politik #2019GantiPresiden

Nuansa politisasi agama terlihat dalam pembagian takjil

gratis yang dibagikan kepada Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa). Aksi pembagian takjil tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 di Masjid Cut Mutia, Jalan Taman Cut Mutiah No 1, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut terpampang banner #2019GantiPresiden dan juga stiker yang tertempel pada setiap takjil yang dibagikan. (Antony 2018)



Sumber: Detikcom

Gambar: Takjil Politik #2019GantiPresiden

Kegiatan filantropis yang diaplikasikan pada momentum berbuka puasa yang merupakan salah satu bagian dari Rukun Ibadah Puasa di dalam agama Islam, dijadikan ruang untuk menyampaikan pesan-pesan politik secara tersirat melalui simbol-simbol yang ada di tempat tersebut. Penempelan stiker pada setiap takjil dapat dilihat sebagai proses komunikasi pesan politik kepada penerima takjil tersebut. Sehingga secara sosiologis, penerima takjil tersebut dapat termotivasi maupun tersugesti terhadap simbol tersebut untuk kemudian mengafirmasi makna yang terkandung didalamnya. Kegiatan filantropis religius ini sangat efektif dalam proses penyampaian, karena terjadi interaksi sosial yang mutualistik antar komunikator dengan komunikan. Di satu sisi komunikator dapat menyampaikan sisi kepedulian melalui kegiatan filantropis ini dan menyampaikan pesan politik #2019GantiPresiden, di sisi lain komunikan mendapatkan takjil buka puasa. Hubungan yang bersifat mutualistik ini dalam perspektif interaksi sosial memudahkan proses penyampaian dan penerimaan pesan.

Elite politik menyadari bahwa banyak kegiatan religius yang memiliki tujuan politik diadakan untuk mendapatkan simpati dan suara umat seperti zikir bersama, pengajian akbar dan lain-lain. Telah disadari bahwa simbol-simbol maupun atribut keagamaan dipercaya dapat meningkatkan popularitas, serta tingkat

penerimaan dengan cara menyentuh sisi emosional umat (Kahmad 2002) (Ramlan 2014). Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan juga dalam agama-agama lain pun berpotensi adanya eksploitasi simbol-simbol agama yang dilakukan untuk kepentingan politik tertentu. (Ramlan 2014)

Cara semacam ini merupakan cara yang terbilang unik dalam deretan kasus politisasi agama yang terjadi di Indonesia. Jika biasanya instrumentalisasi agama diposisikan dalam konteks tokoh-tokoh agama dan legitimasi doktrin untuk kepentingan politik praktis, pendekatan yang dilakukan ini lebih menekankan aspek filantropi sosial religius yang dapat dilihat sebagai sebuah manifestasi dalam mencapai kepentingan tertentu, yaitu kepentingan #2019GantiPresiden.

Dalam perspektif politik pasca-kebenaran, ada hal yang perlu dicermati dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Andre Rosiade dalam menanggapi aksi pembagian takjil gratis tersebut (Antony 2018):

“Kalau nggak suka kan tinggal bagi-bagi takjil juga dengan tagline ‘Jokowi 2 periode’ kan,”

Dalam pandangan penulis, pernyataan tersebut sangat afirmatif dengan mentalitas pasca-kebenaran. Secara tersirat pernyataan tersebut menggambarkan unsur pembenaran terhadap aksi yang dilakukan tersebut. Legitimasi terhadap aksi politisasi kegiatan buka bersama dan pembagian takjil tersebut terlihat secara implisit dalam ajakannya kepada lawan politiknya agar mengikuti jejak politisasi tersebut. Secara substantif dan akal sehat, bulan ramadan adalah bulan sakral di dalam agama islam, dimana secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas spiritualitas individu maupun sosial di kalangan muslim, tetapi disisipi dengan pesan politik tertentu yang bersifat profan dan pragmatis. Beberapa pihak yang menilai acara tersebut kurang mengindahkan etika religius. Jika ditinjau dalam perspektif demokrasi, politisasi agama seperti yang tercermin dalam aksi tersebut menggambarkan kondisi perpolitikan yang kurang menyehatkan. Konteks penalaran *common sense* seperti inilah yang hilang dalam realitas politik pasca-kebenaran.

Umrah Politik

Pada tanggal 1 Juni 2018, Amien Rais, Prabowo Subianto, dan

dua elit PKS melakukan umrah ke tanah suci. Banyak pihak yang menyebut bahwa umrah tersebut adalah umrah politik. Amien Rais mengakui hal tersebut adalah benar. Disana mereka juga bertemu dengan Rizieq Shihab. (Putri 2018)

“Umrah politik itu betul. Umrah dulu baru politik. Umrahnya di tanah suci di (Masjidil) Haram, politiknya di rumahnya Habib Rizieq,”

Labelisasi kegiatan keagamaan dengan politik memiliki implikasi yang kompleks terhadap konstelasi diskursus politik yang ada. Hal ini dapat dikategorikan dengan politisasi agama, karena menggunakan instrumen agama yaitu umroh untuk melakukan citra politik. Citra politik yang menggunakan sentimen keagamaan inilah yang berpotensi memicu konflik dan friksi dalam dukungan politik antar tokoh politik. Di satu sisi terdapat klaim kesalehan terhadap tokoh politik yang ia dukung, di sisi lain terdapat unsur politisasi agama yang menguatkan sentimen horizontal dalam konstelasi politik. Dalam konteks politik yang multikultur, sentimen semacam ini tidak seharusnya mewarnai kompetisi politik yang ada. Citra dan identitas religius yang didulang untuk kepentingan politik, merupakan sebuah bentuk instrumentalisasi agama.

Dikotomi Partai Allah dengan Partai Setan

Salah satu tokoh agama yang menyuarakan dengan vokal gerakan #2019GantiPresiden adalah Amien Rais. Amien Rais mengeluarkan sebuah pernyataan yang kontroversial di kalangan publik. Ia melakukan dikotomi dan menciptakan terminologi baru, yaitu partai Allah dan partai Setan. Berikut kutipan pernyataannya (Wicaksono 2018):

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? Untuk melawan hizbusy syaithan,... Orang-orang yang anti Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya... Tapi di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,”

Amien Rais menyatakannya dalam tausiyah setelah mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018. Dalam rangkaian acaranya juga terdapat bai'at kepada Rizieq Shihab. Secara formal, hal tersebut dapat dikategorikan dalam politisasi agama, terkhusus dalam konteks politisasi masjid. Masjid menjadi instrumen (tepatnya sebuah ruang) yang dilakukan untuk memberikan pesan politik berupa seruan tentang Partai Allah dan partai Setan. Tindakan Amien Rais tersebut merupakan sebuah bukti politisasi agama lewat ceramah-ceramah keagamaan dan tempat ibadah. Hal yang dinilai lebih provokatif adalah tindakannya yang menciptakan terminologi Partai Allah Dan Partai Setan serta mendikotomikannya. Dengan melakukan legitimasi doktrin agama, ia mengajak kepada jemaat yang ada untuk memberikan apresiasi yang positif terhadap partai Allah dan melakukan marginalisasi kelompok yang diidentifikasi sebagai partai setan. Amien Rais beberapa kali dikonfirmasi oleh media terkait dikotominya tersebut, namun ia menolak menjelaskan secara eksplisit partai-partai mana saja yang dikategorikan sebagai partai Allah dan partai setan.

Dikotomi Amien Rais tersebut juga menggunakan istilah yang religius, yaitu Allah dan setan dalam menyifati sebuah hal yang profan, yaitu partai. Hal ini menunjukkan bahwa secara simbolik terjadi proses sakralisasi dalam dikotomi tersebut, namun lebih jauh lagi dapat dilihat sebagai politisasi agama. Simbol-simbol agama digunakan untuk menyampaikan pesan politik dan mendulang massa agar bersimpati terhadap partai Allah. Tindakan semacam ini dikhawatirkan dapat menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat. Masyarakat akhirnya terpecah belah dalam dikotomi yang bernuansa agama ini. Karena sentimen religius semacam ini mendikotomikan hal seperti hitam putih dalam sebuah diferensiasi yang dapat memicu konflik horizontal.

Amien Rais pernah menulis dalam sebuah buku yang dieditori oleh Geoff Forester. Amien Rais menyatakan bahwa:

“Jika ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol keagamaan digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, agama akan menjadi sebuah isu yang memecah belah kaum muslimin, dan prinsip-prinsip serta keyakinan-keyakinan yang sensitif yang mungkin tidak dapat dinegosiasikan akan membebani

politik pemilu". (Rais 1999) (Ramlan 2014)

Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang ia lakukan terkait dikotomi partai Allah dan partai Setan. Walaupun pernyataan tersebut adalah pendiriannya pada awal reformasi, namun dapat dilihat bahwa terdapat inkonsistensi prinsip dan pergeseran pendirian Amien Rais dalam kasus dikotomi ini, berkaca dari tulisan ia pernah buat. Tulisan tersebut secara implisit bermakna himbauan untuk menghindari politisasi simbol-simbol agama dan ungkapan-ungkapan agama di ruang publik. Dikarenakan isu agama dan keyakinan merupakan hal yang sensitif, ia menduga dapat membebani pemilu. Walaupun suasana sentimen agama dalam politik reformasi dan era sekarang tidak dapat disamakan, prinsip amien dalam hal konteks politisasi tersebut dapat dilihat sebagai sebuah bentuk perubahan bahkan terlihat bergeser menuju arah politisasi simbol-simbol agama, seperti yang ia nyatakan dalam melakukan dikotomi partai Allah dan partai setan.

Dikotomi Poros Mekkah dengan Poros Beijing

Wacana dikotomi poros mekkah dengan poros beijing dikemukakan oleh Rizieq Shihab, Imam besar FPI kepada Sekretaris Jendral Sekber Indonesia Muhammad Idrus saat berkunjung ke mekkah. Sekber atau Sekretariat bersama Indonesia diisi oleh tiga partai politik, yaitu Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sebelum dikotomi poros mekkah dan poros beijing ini disampaikan oleh Rizieq Shihab, ia telah mengutarakan sebuah ide adanya pembentukan "Koalisi Umat". (Friana 2018)

Di tengah memanasnya suhu politik akibat perang diskursus stigma dan labelisasi politik, dikotomi semacam ini dapat berpotensi memecah belah masyarakat. Potensi masyarakat menjadi tersegregasi dengan adanya dikotomi semacam ini besar, karena istilah mekkah dan beijing telah memiliki konotasi dan stigma yang memiliki daya diskriminatif antara satu dengan yang lainnya. Sentimen etnisitas dan agama sangat berperan dalam konstruksi pemahaman masyarakat atas label yang dibuat. Terdapat politisasi sentimen etnisitas dan agama dalam munculnya dikotomi tersebut.

Terminologi poros mekkah menyiratkan makna kepada masyarakat bahwa kubu ini adalah kubu yang islamis, religius, dan

membawa visi perubahan. Sedangkan terminologi poros beijing mengandung stigma yang dimainkan oleh lawan politiknya sebagai sentimen “china”. Sentimen anti-china yang dimainkan saat kasus Ahok bergulir (Koning 2018) memberikan efek yang besar dalam pengaruhnya dalam membuat masyarakat terpolarisasi dan mengalami ideologisasi anti-china pada sebagian kelompok. Sehingga masyarakat secara umum dapat menangkap pesan politik yang dimaksud dalam pembentukan istilah semacam itu, seperti analogi hitam putih. Masyarakat Indonesia masih rawan terhadap hal yang berkaitan dengan kapitalisasi agama. Hal ini dapat dengan mudah berpotensi menyulut konflik etnisitas dan agama dan memperburuk suasana demokrasi dan kesetaraan di Indonesia.

Secara sosiologis, prasangka dan stigma yang bermain dalam hal pemaknaan dikotomi yang menggunakan sentimen etnisitas dan agama tersebut telah dikapitalisasi dalam iklim politik. Masyarakat majemuk memiliki potensi yang besar untuk terjadi perpecahan jika kapitalisasi sentimen etnisitas dan agama melebar. Sentimen etnisitas dan agama merupakan hal yang bersifat sederajat satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terdapat stratifikasi. Diferensiasi sosial merupakan terminologi yang digunakan untuk mengakomodasi nilai-nilai kesederajatan setiap suku, agama, maupun ras dimana tidak ada kategorisasi yang bersifat stratifikatif. Jika sentimen seperti ini dimainkan dalam iklim politik, maka sangat berpotensi untuk lahir wacana mayoritas-minoritas. Wacana seperti ini tidak sesuai dengan semangat kesederajatan karena bersifat diskriminatif terhadap hak-hak politik minoritas dan cenderung represif. Sikap-sikap eksklusif dan sentimen kelompok dapat memperparah kapitalisasi sentimen etnisitas dan agama dalam politik. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menuju iklim demokrasi yang sehat.

D. POLITISASI AGAMA SEBAGAI SEBUAH FENOMENA POLITIK PASCA-KEBENARAN: ANTARA POPULISME, DISTORSI INFORMASI, DAN LEGITIMASI

Era pasca-kebenaran tidak bisa lepas dari realitas populistik. Wacana yang digulirkan dalam persaingan politik diwarnai dengan isu-isu populis. Populisme menurut Jansen (2015) adalah sebuah perilaku politik dimana terdapat aktor-aktor politik yang dapat memobilisasi kelompok sosial yang biasanya terpinggirkan kemudian

membuat kelompok tersebut dapat secara aktif melakukan aksi politik yang nyata dan kontroversial. Dua komponen penting dalam populisme adalah mobilisasi dan diskursifitas (Jansen 2015) (Evin dan Gisclon 2016).

Populisme memiliki beberapa ciri-ciri yang bersifat umum. Pertama, anti kemapanan, yaitu representasi dari kelompok yang marginal atau termarginalkan; kedua, adanya pemimpin yang memiliki otoritas, baik melalui kharisma atau figur personal maupun pesan yang bersifat apokaliptik. Ketiga, perasaan in-group yang kuat, dapat dilihat dalam konteks yang sering ditonjolkan oleh sebagian pihak sebagai 'kita vs mereka' yang membatasi satu kelompok dengan yang lainnya, kelompok yang bersifat diferensial. (Perdana 2017)

Isu populis adalah isu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Isu tersebut bukanlah isu yang hanya dipahami oleh lapisan sosial tertentu. Isu populis sering mengangkat tema yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan hal tersebut, isu populis mudah mendapatkan simpati dan basis massa dari masyarakat luas. (Firmanzah 2011)

Sebagai sebuah eksemplar, gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang awalnya didirikan sebagai *Wake up call* atau peringatan dini terhadap "kisruhnya" pemerintahan saat ini. Mardani Ali sera sebagai salah seorang pencetus gerakan ini menekankan *Wake up call* ini kepada masyarakat muslim Indonesia (terutama simpatisan gerakan tersebut) agar tidak hanya berdiam diri dalam berpolitik menjelang pemilihan presiden 2019 (Kresna 2018). Dengan menggunakan legitimasi agama, baik doktrin-doktrin primer dalam al-Qur'an maupun hadis akhir zaman yang sering dikutip untuk memperkuat legitimasi pernyataan yang ia buat, para elit #2019GantiPresiden seringkali menggulirkan isu-isu populistik. Fakta yang dijadikan basis legitimasinya pun kadang kala berupa fakta yang terpotong-potong konteksnya dan tidak berimbang. Dalam konteks #2019GantiPresiden, yang secara umum tidak hanya menjadi propaganda agama sebagai alat politik, tetapi untuk menghembuskan isu-isu politik yang dinilainya Indonesia dalam negara *bahaya*.

Wacana populistik yang bersifat umum (tidak berkaitan dengan agama, namun secara tidak langsung menjadi dukungan atas parsialitas legitimasi agama) yang digulirkan contohnya adalah

tingginya hutang negara. Banyak pakar ekonomi maupun dari pihak kementerian keuangan sendiri yang telah berusaha mengklarifikasi isu tersebut. Hal yang diklarifikasi adalah disamping hutang yang dinilai oleh pihak tertentu membahayakan, pendapatan ekonomi dalam negeri juga dalam rasio yang wajar (Aryanti 2017). Artinya dalam proses diseminasi wacana populistik ini terdapat fakta parsial yang hanya melihat dari sisi hutangnya saja, tidak dalam sisi yang lain.

Selain isu tingginya hutang negara, isu yang dipolitisasi adalah tingginya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, padahal dalam data statistik survei menyatakan prevalensinya sangat sedikit jika dibandingkan dengan tenaga kerja domestik (Purnamasari 2018). Kebijakan jokowi dalam mempermudah visa tenaga kerja asing, dianggap oleh pihak tertentu sebagai sebuah bukti keberpihakan jokowi kepada tenaga kerja asing. Wacana yang dikonstruksi oleh gerakan #2019GantiPresiden cenderung proteksionistik, bersifat SARA, dan kembali menghidupkan sentimen pribumi-non pribumi. Kebangkitan wacana proteksionis semacam ini sama halnya dengan wacana populis Trump yang menjanjikan kebangkitan amerika di dunia dengan melakukan kebijakan yang proteksionis bahkan diskriminatif. Kebijakan yang ia gulirkan bahkan cenderung rasis dan diskriminatif, dengan melakukan legitimasi yang sangat subjektif yang ia anggap sesuai dengan kepentingan politiknya.

Distorsi informasi juga terjadi dalam mengerucutnya isu kenaikan harga BBM. Banyak sekali media islamis yang mempolitisasi isu ini untuk membuktikan inkonsistensi janji kampanye politik jokowi terkait kenaikan harga BBM. Padahal, fakta yang sebenarnya adalah kenaikan harga BBM hanya terjadi pada varian BBM peramax yang notabene digunakan sebagai bahan bakar kendaraan untuk kelas sosial menengah ke atas. Jokowi dituduh tidak pro terhadap rakyat kecil. Dengan kemudahan akses informasi di era pasca-kebenaran saat ini, argumentasi parsial semacam itu mudah viral dan mudah dipercaya oleh masyarakat awam yang dibuktikan dengan banyaknya repost terkait berita yang bersifat parsial (contoh kasus di instagram dengan tagar #2019GantiPresiden).

Akumulasi dari berbagai permasalahan terkait kebijakan sosial dan politik jokowi akhirnya menjadi bagian dari narasi #2019GantiPresiden sebagai *Wake up call*. Tidak hanya parsialitas fakta, terkadang dalam menyampaikan narasinya digunakanlah

dalil-dalil yang secara tematik termasuk dalam dalil-dalil tanda akhir zaman di dalam islam. Narasi tersebut disampaikan dalam instagram dengan menggunakan tagar #2019GantiPresiden. Tindakan yang seperti pasal karet semacam ini merupakan sebuah mentalitas pasca-kebenaran, dimana fakta parsial dan opini emosional lebih mendominasi daripada fakta objektif. Legitimasi dijadikan pedoman untuk menunjang kepentingan politik tertentu, yaitu dalam konteks ini adalah untuk tidak memilih jokowi kembali jika mencalonkan diri kembali menjadi presiden pada tahun 2019. Agitasi dan propaganda politik yang dikemas dalam bingkai subjektifitas fakta seperti inilah yang mewarnai realitas politik pasca-kebenaran di indonesia. Instrumentalisasi agama menjadi poin penting dalam menarik simpati emosional masyarakat awam dalam mempropagandakan gerakan #2019GantiPresiden.

Tidak hanya isu agama, isu etnisitas dan rumor juga hadir di media sosial. Muncul isu yang mempertanyakan genealogi etnisitas dan ideologi jokowi yang dikaitkan dengan komunisme (Satrio 2018). Tagar #2019GantiPresiden juga mempropagandakan isu bangkitnya komunisme di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mengalami trauma terhadap peristiwa G30S yang hingga saat ini menjadi perdebatan dan diskusi di kalangan sejarawan, dipolitisasi dan dieksploitasi nalar traumatiknya untuk kepentingan politik praktis ini. Terlepas dari perdebatan eksistensi ideologi komunisme di Indonesia baik secara formal maupun tidak, isu komunisme telah menjadi komoditas politik bagi oposisi jokowi, termasuk yang tergabung dalam #2019GantiPresiden.

Terlebih konstruksi masyarakat Indonesia terkait komunisme masih terasosiasikan dengan ateisme (Budiawan 2004). Hal ini menjadi keuntungan sendiri bagi kelompok islamis, dimana memanfaatkan konteks religiusitas masyarakat Indonesia untuk kepentingan politik. Dengan begitu, isu ideologi yang bercampur dengan konstruksi sosial-agama ini menjadi strategi politik bagi kelompok oposisi terhadap golongan nasionalis.

Dengan menggunakan eksemplar kasus-kasus diatas, dapat ditarik sebuah benang merah dimana Politisasi agama di Indonesia pada tahun politik ini dapat dilacak dengan melakukan analisis pasca-kebenaran. Analisis terhadap realitas politik yang ada dengan menggunakan konsep populisme yang mengelaborasi informasi yang distortif dan parsial hingga menjadi legitimasi atas politisasi agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok berkepentingan.

Perspektif ini tidak lepas dari pengalaman Indonesia dalam deretan kasus politisasi agama yang terjadi di dalamnya.

E. POLITIK PASCA-KEBENARAN SEBAGAI ANCAMAN BAGI DEMOKRASI

Realitas politik pasca-kebenaran di Indonesia dapat dilihat dalam kasus politisasi agama di tahun politik 2018-2019. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi iklim demokrasi di Indonesia, jika realitas politik pasca-kebenaran tidak dikelola dan dikritisi. Demokrasi menyediakan ruang untuk setiap individu yang ada di masyarakat dalam rangka mengekspresikan kebebasan berpolitik secara bebas dan bertanggungjawab. Realitas pasca-kebenaran yang lebih menempatkan opini subjektif untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu, menjadikan tantangan bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia agar tetap kritis terhadap fenomena populistik dan instrumentalisasi agama untuk kepentingan politis.

Demokrasi memiliki tujuan yang bukan hanya menitikberatkan pada struktur organisasi yang rapi, melainkan pertumbuhan warga negara dalam mencapai keinginannya masing-masing. Setiap warga negara diberikan hak untuk mengekspresikan suaranya dengan bebas dan bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk berlaku dan diperlakukan secara demokratis dalam sebuah negara. Seharusnya sistem pemerintahan demokratis menciptakan sebuah iklim sosial yang mendewasakan warganya. Menurut Juan dan Alfred, demokrasi didefinisikan dengan sebuah kondisi dimana persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menduduki kursi-kursi pemerintahan. Implikasinya, demokrasi menuntut terciptanya iklim pemilu yang bebas dan bersifat kompetitif. Maswadi Rauf menguraikan bahwa konsep perbedaan dan persamaan di antara sesama manusia melahirkan beberapa persyaratan yang penekanannya terletak pada individu, persetujuan sebagai dasar dalam interaksi sosial antar manusia, ekuualitas antar sesama manusia, keragaman, hak suara yang tidak terkekang, dan kebebasan untuk berpendapat maupun berkumpul. (Mufti dan Naafisah 2013)

Jika politik etnisitas dan agama yang dilegitimasi dengan isu-isu populis terus berjalan, semangat inti demokrasi untuk menciptakan iklim elektoral yang kompetitif dan bebas tidak

akan tercapai. Politik pasca-kebenaran menghambat proses demokratisasi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi negara maupun masyarakat untuk hadir dalam memerangi wacana populistik yang merugikan proses pencerdasan politik masyarakat Indonesia.

F. PENUTUP

Tahun politik Indonesia tidak dipungkiri diwarnai dengan politisasi agama. Dengan menggunakan eksemplar gerakan #2019GantiPresiden, menunjukkan bahwa realitas politik pasca-kebenaran tidak dapat dinafikan. Dengan menggunakan sentimen etnisitas dan agama, gerakan ini telah melakukan politisasi agama berbasis pada wacana-wacana yang populistik dengan argumentasi informasi-informasi yang distortif untuk menghidupkan daya legitimasi agama dalam rangka kepentingan politik. Realitas politik pasca-kebenaran menjadi ancaman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Sudah saatnya berbagai pihak, baik dari pemerintah sampai ke masyarakat sipil dan akar rumput meningkatkan daya kritis terhadap isu-isu populistik dan gejala politisasi agama agar iklim demokrasi Indonesia ke depan dapat terjaga dalam kondisi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony, Noval Dhwinuari. *Kontroversi Takjil Politik #2019GantiPresiden*. 2018. <https://m.detik.com/news/berita/d-4039286/kontroversi-takjil-politik-> (diakses Juli 3, 2018).
- Aryanti, Fiki. *Sri Mulyani: Rasio Utang RI terhadap PDB Relatif Baik*. 13 Februari 2017. <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2854434/sri-mulyani-rasio-utang-ri-terhadap-pdb-relatif-baik> (diakses Juli 6, 2018).
- Budiawan. *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Coughlan, S. *What does post-truth mean for a philosopher?* 2017. <http://www.bbc.com/news/education-38557838> (diakses Juli 2, 2018).
- Evin, Ahmet, dan Megan Gisclon. *The Sliding West: Populism and Religion as Challenges to Liberal Order*. Istanbul: Istanbul Policy Center, 2016.
- Faiz, Dhio. *Seruan Amien Rais Cs soal Ganti Presiden dan Baiat ke Rizieq*. 13 April 2018. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180413083846-20-290491/seruan-amien-raiscs-soal-ganti-presiden-dan-baiat-ke-rizieq> (diakses Juli 2, 2018).
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Friana, Hendra. *Potensi Politisasi SARA di Balik Wacana Poros Makkah vs Beijing*. 19 Juni 2018. <https://tirto.id/potensi-politisasi-sara-di-balik-wacana-poros-makkah-vs-beijing-cMxw> (diakses Juli 2, 2018).
- . *Seruan-Seruan Terkait Politik Praktis pada Reuni Aksi 212*. 3 Desember 2017. <https://tirto.id/seruan-seruan-terkait-politik-praktis-pada-reuni-aksi-212-cA5c> (diakses Juli 5, 2018).
- Institute for Policy Analysis of Conflict. *After Ahok: The Islamist Agenda in Indonesia*. IPAC Report No. 44, Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict, 2018.

- Jansen, Robert S. "Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism." Dalam *The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives*, disunting oleh Carlos de la Torre. Lexington: University of Kentucky Press, 2015.
- JPNN. *Penggagas #2019GantiPresiden Dukung Politik Masuk Masjid*. 18 April 2018. <https://m.jpnn.com/news/penggagas-2019gantipresiden-dukung-politik-masuk-masjid> (diakses Juli 2, 2018).
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kellner, Douglas. "Donald Trump and the Politics of Lying." Dalam *Post-Truth, Fake News*, disunting oleh M. A. Peters et al., 89-100. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2018.
- Koning, Juliette. "Chinese Indonesians." Dalam *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, disunting oleh Robert W. Hefner, 179. New York: Routledge, 2018.
- Kresna, Mawa. *Para Politikus di Belakang Layar Gerakan '2019 Ganti Presiden'*. 2 Mei 2018. <https://tirto.id/para-politikus-di-belakang-layar-gerakan-0392019-ganti-presiden039-cJKx> (diakses Juli 2, 2018).
- . *Peringatan Setahun 212 dan Tantangan Menghimpun Lagi Gerakan*. 2 Desember 2017. <https://tirto.id/peringatan-setahun-212-dan-tantangan-menghimpun-lagi-gerakan-cAMR> (diakses Juli 5, 2018).
- Legg, Catherine. "'The Solution to Poor Opinions Is More Opinions': Peircean Pragmatist Tactics for the Epistemic Long Game." Dalam *Post-Truth, Fake News*, disunting oleh M. A. Peters et al., 45. Singapura: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018.
- Lintang, GM Nur. *Kemenangan Trump dan fenomena pasca-kebenaran*. 19 Desember 2016. <http://www.antarane.ws.com/berita/602341/kemenangan-trump-dan-fenomena-pasca-kebenaran> (diakses Juli 2, 2018).
- Malik, Abdul, dan Ariyandi Batubara. "Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi." *Kontekstualita* 29, no. 2 (2014): 99.

- McIntyre, Lee C. *Post-truth*. Cambridge: MIT Press, 2018.
- Mufti, Muslim, dan Didah Durrotun Naafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.
- Perdana, Ari A. *Menguatnya Populisme: Trump, Brexit hingga FPI*. 23 Januari 2017. <http://indoprogress.com/2017/01/menguatnya-populisme-trump-brexit-hingga-fpi/> (diakses Juli 6, 2018).
- Purnamasari, Desi. *28 Persen Tenaga Kerja Asing Berasal dari Cina*. 16 Mei 2018. <https://tirto.id/28-persen-tenaga-kerja-asing-berasal-dari-cina-cKqJ> (diakses Juli 2, 2018).
- Putri, Budiarti Utami. *Amien Rais Akui Sebutan Umrah Politik Benar*. Disunting oleh Ninis Chairunnisa. 10 Juni 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1097043/amien-rais-akui-sebutan-umrah-politik-benar> (diakses Juli 2, 2018).
- Rais, Amien. "Islam and Politics in Contemporary Indonesia." Dalam *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?*, disunting oleh Geoff Forester, 201. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1999.
- Ramlan, Idrus. "Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama dalam Wilayah Publik." *MADANIA* 8, no. 2 (2014): 161.
- Sabato, Larry J., Kyle Kondik, dan Geoffrey Skelley, . *Trumped*. Maryland: Rowman & Littlefield, 2017.
- Satrio, Arie Dwi. *Isu #2019GantiPresiden, Luhut: Sah-Sah Saja Presiden Jengkel*. Minggu April 2018. <https://news.okezone.com/read/2018/04/08/337/1883746/isu-2019gantipresiden-luhut-sah-sah-saja-presiden-jengkel> (diakses Juli 6, 2018).
- Wicaksono, Adhi. *Amien Rais dikotomikan Partai Allah dan Partai Setan*. 2018. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180413144201-32-290626/amien-rais-dikotomikan-partai-setan-dan-partai-allah> (diakses Juli 3, 2018).
- Wiwoho, Bimo. *Deklarasi #2019GantiPresiden Diklaim Bukan Gerakan Politik*. 3 Mei 2018. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180503182913-20-295516/deklarasi->

2019gantipresiden-diklaim-bukan-gerakan-politik (diakses Juli 2, 2018).